

**CAPACITY BUILDING**  
**BAGI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)**  
**(Program Perkuatan Bagi PPKL yang Ditugaskan di Provinsi Jawa Barat)**

**Yuanita Indriani**  
**Institut Manajemen Koperasi Indonesia**  
[yuanitaindriani@gmail.com](mailto:yuanitaindriani@gmail.com)

**Abstrak**

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah personil yang direkrut dan diangkat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditempatkan dan diberi tugas khusus untuk menjalankan tugas pendampingan dan pembinaan dalam upaya mengembangkan koperasi di seluruh NKRI. Peran dan fungsi PPKL menjadi sangat penting dan perlu mengingat berbagai hal, diantaranya adalah: keterbatasan jumlah SDM Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat pusat serta jumlah SDM pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyuluhan adalah proses pendidikan, proses komunikasi dan proses perubahan, dengan demikian, seorang Penyuluh koperasi haruslah seorang pendidik, komunikator dan penggerak. Dengan demikian, PPKL harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, baik dari aspek pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian, kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk melakukan persuasi kepada anggota koperasi dan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dan telah ditentukan serta disepakati bersama. Di lain pihak PPKL memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik latar belakang pendidikan formalnya maupun pengalamannya, sehingga pengetahuan dan pemahamannya terhadap koperasi juga beragam, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya diperlukan kegiatan penguatan dalam bentuk kegiatan *Capacity Building* bagi tenaga PPKL.

Output kegiatan ini adalah terbangunnya kompetensi 130 orang PPKL yang ditempatkan di Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya berbagai indikator kinerja PPKL, melalui penetapan tujuan yang lebih jelas dan terukur, pelaksanaan bimbingan dan dampingan yang lebih efektif, serta pelaporan hasil kerja yang lebih baik.

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah pelatihan yang dilakukan secara klasikal yang terdiri dari materi pengantar, materi inti dan materi pendukung. Kegiatan capacity building diikuti dengan kegiatan Konsultasi Manajemen Koperasi.

**Key words:** Capacity Building; Penyuluhan; Perkoperasian

## I. PENDAHULUAN

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut dan diangkat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditempatkan dan diberi tugas khusus untuk menjalankan tugas pendampingan dan pembinaan dalam upaya mengembangkan koperasi di seluruh NKRI. Peran dan fungsi PPKL menjadi sangat penting dan perlu mengingat berbagai hal, diantaranya adalah:

keterbatasan jumlah SDM Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat pusat serta jumlah SDM pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain juga karena dampak diberlakukannya Undang - Undang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan tingginya perputaran pegawai pada masing-masing daerah, sehingga terjadi kelangkaan SDM profesional pembina koperasi, yang betul-betul memahami karakteristik organisasi koperasi beserta implikasinya dan pemahaman

mengenai strategi menggerakkan dan melakukan perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Tugas pokok dan fungsi PPKL adalah melakukan penyuluhan kepada koperasi, mencakup kegiatan pendataan, dan pendampingan kepada masyarakat yang akan bergabung atau berminat untuk mendirikan koperasi. Tugas lain PPKL adalah membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lingkungan pemerintah (Dinas yang membidangi koperasi) di wilayah kerjanya masing-masing, untuk mendiskusikan sasaran dan target pembinaan koperasi.

Peran dan fungsi PPKL adalah sebagai:

- 1) komunikator, dalam hal ini PPKL memberikan informasi kepada Koperasi dan sebaliknya mendapatkan informasi dari koperasi binaannya untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pembinaan.
- 2) Enumerator yaitu melaksanakan pendataan Koperasi, dalam upaya membangun database koperasi binaannya, dan lebih jauh dapat digabungkan menjadi data base koperasi wilayah binaan hingga tingkat nasional. Data base yang terbangun akan menjadi sumber data yang akurat dan update, dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembinaan koperasi.
- 3) Motivator, PPKL harus dapat memotivasi Pengurus, Pengawas, Pengelola, Anggota dan masyarakat untuk berkoperasi dengan baik dan benar.
- 4) Mentor, PPKL harus dapat berperan sebagai pendamping perkoperasian dan gerakan masyarakat berkoperasi, menjadi mentor dalam pembenahan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi.
- 5) Mediator atau Collaborator, dalam hal ini PPKL harus dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara Koperasi dengan para pemangku kepentingannya.

Jika fungsi dan peran PPKL dikaitkan dengan Indikator penilaian kinerjanya yang mencakup pendataan koperasi, penyusunan rencana kerja, penyuluhan dan pendampingan koperasi, penyuluhan kepada kelompok masyarakat, inventarisasi pengembangan potensi wilayah kerja, publikasi kegiatan penyuluhan koperasi binaan, identifikasi investasi ilegal berkedok koperasi, serta penilaian tambahan dari koordinator PPKL, dapat dikatakan bahwa lingkup pekerjaan PPKL bukan hanya luas namun juga mendalam. Dengan demikian seorang PPKL harus memahami berbagai pengetahuan dan keahlian, baik yang terkait dengan keilmuan yang terkait, perkoperasian maupun komunikasi serta kemampuan membangun sinergi dari berbagai potensi yang ada untuk menghasilkan manfaat terbesar, khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Secara teoritis, pengertian penyuluhan adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk merubah perilaku seseorang atau masyarakat dari kondisi aktual menjadi kondisi ideal, penyuluhan merupakan proses yang disengaja dan direncanakan untuk mengubah kondisi saat ini yang sudah dianggap tidak baik atau usang menjadi sebuah kondisi yang lebih baik atau bahkan terbaik. Dengan demikian kegiatan penyuluhan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jika pengertian Penyuluhan dikaitkan dengan fungsi, peran dan indikator kinerja PPKL, akan terdapat irisan pada pemahaman dan pengetahuan PPKL terhadap apa yang menjadi bidang tugasnya, dalam hal ini adalah pemahaman PPKL terhadap konsepsi koperasi, perkoperasian serta implementasinya sesuai dengan jatidiri koperasi, serta kemampuan PPKL untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal koperasi, serta membuat perubahan yang terencana untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Tarya dan Toto menyatakan bahwa penyuluhan adalah proses pendidikan, proses komunikasi dan proses perubahan, dengan demikian maka

seorang penyuluh haruslah seorang pendidik, komunikator dan penggerak. Dengan demikian, PPKL harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, baik dari aspek pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian, kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk melakukan persuasi kepada anggota koperasi dan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dan telah ditentukan serta disepakati bersama. Di lain pihak PPKL memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik latar belakang pendidikan formalnya maupun pengalamannya, sehingga pengetahuan dan pemahamannya terhadap koperasi juga beragam. Berdasarkan gambaran tersebut, dianggap perlu dan penting untuk dilakukan Capacity Building bagi PPKL, agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif, dalam arti keberadaan PPKL menjadi solusi terbaik dari permasalahan pembinaan koperasi yang selama ini dihadapi.

## II. OUTPUT DAN OUTCOME

### *Output*

Output yang dihasilkan dari kegiatan Capacity Building ini adalah terbangunnya kompetensi 130 orang PPKL yang ditempatkan di Provinsi Jawa Barat, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kerja pembinaan dan pendampingan koperasi.

### *Outcome*

Outcome dari kegiatan Capacity Building ini adalah tercapainya berbagai indikator kinerja PPKL, melalui penetapan tujuan yang lebih jelas dan terukur, pelaksanaan bimbingan dan dampingan yang lebih efektif, serta pelaporan hasil kerja yang lebih baik, dengan demikian dapat diharapkan Koperasi binaan dapat memenuhi indikator Koperasi Juara.

## III. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan Capacity Building ini dilakukan ditetapkan sesuai dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rekrutmen Peserta, peserta capacity building ini adalah seluruh PPKL yang ditempatkan di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 130 orang PPKL. Metode rekrutmen peserta capacity building yang digunakan adalah dengan pengiriman pesan melalui WA Group PPKL Jawa Barat;
- 2) Penetapan materi Capacity Building, dilakukan melalui desk research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya didasarkan pada data dan informasi yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UK Provinsi Jawa Barat terkait dengan kendala pelaksanaan tugas PPKL yang ditempatkan di wilayah Provinsi Jawa Barat, mencakup:
  - a. Keterampilan mengidentifikasi masalah dan penetapan tujuan pembinaan dan dampingan
  - b. Keterampilan berkomunikasi secara efektif;
  - c. Strategi membangun sinergi dari berbagai potensi pengembangan koperasi;
  - d. Penetapan Program dan target pembinaan dan pendampingan.
- 3) Penyampaian materi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu:
  - a. Penyampaian materi secara klasikal di kelas;
  - b. Konsultasi Manajemen Koperasi yang dilakukan pasca kegiatan pemberian materi secara klasikal melalui diskusi pada WA group yang beranggotakan PPKL sasaran dan Instruktur serta tatap muka dengan instruktur dan unsur Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan lapangan.

## IV. PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Bentuk PKM yang dilaksanakan dalam kegiatan Capacity Building ini adalah pelatihan yang diikuti dengan kegiatan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK),

adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Materi Pengantar
  - a. Keragaan Koperasi Jawa Barat serta target pengembangannya;
  - b. Peran PPKL dalam mewujudkan Koperasi Juara.
  - c. Pemahaman terhadap TUPOKSI dan target kerja PPKL.
2. Materi Utama
  - a. Koperasi dan Perkoperasian (apa, mengapa, siapa, kapan dan bagaimana);
  - b. Indikator Koperasi Juara;
  - c. Penyuluhan sebagai Strategi Pengembangan Koperasi Jawa Barat.
3. Materi Pendukung
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (Dasar, Arah dan Target)
  - b. Pelaporan kinerja PPKL (mekanisme pelaporan, data base, pemanfaatan data dan informasi kinerja PPKL)

Kegiatan KMK dilakukan sesuai topik dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing koperasi, PPKL diharapkan akan secara aktif melakukan pendampingan dan monitoring kegiatan organisasi dan usaha koperasi yang menjadi bidang garapannya. Kegiatan KMK pasca kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara klasikal diperlukan mengingat berbagai hal berikut:

- 1) Tenaga PPKL berlatar belakang pendidikan formal yang sangat beragam dan pada umumnya mereka adalah *fresh graduate* dan tidak memiliki pengalaman berkoperasi atau mendapat pengetahuan khusus tentang perkoperasian sebelum mereka menjadi PPKL, pengetahuan tentang perkoperasian diperoleh pada program penguatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM – RI segera setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai PPKL;
- 2) Pada umumnya rentang usia PPKL adalah antara 23 – 35 tahun, memiliki jarak usia yang sangat jauh dengan pengurus, pengawas dan manajer koperasi, selain kendala perbedaan usia, juga kendala yang dihadapi PPKL adalah pengalaman

berkoperasi, sehingga pada umumnya Pengurus merasa kurang percaya kepada PPKL yang belum memiliki pengalaman berkoperasi namun bertindak sebagai pembina koperasi, hal ini memerlukan pendekatan dan strategi khusus, yang dapat dilakukan melalui KMK.

- 3) Ikopin memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan pendampingan baik bagi koperasi maupun PPKL, sehingga LPPM Ikopin yang telah bekerjasama dengan baik dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, juga dapat menjadi mitra para PPKL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, manfaat yang diperoleh LPPM Ikopin dengan kegiatan ini adalah diperolehnya mitra kerjasama, dalam hal ini PPKL yang dapat memperkaya pengetahuan, data dan informasi keragaan koperasi Provinsi Jawa Barat.

Foto Kegiatan Pelaksanaan





## V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### a. Simpulan

- 1) Capacity building yang dilakukan dapat dikatakan berhasil, karena tujuan kegiatan capacity building yaitu meningkatkan kesadaran PPKL akan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, meningkatnya minat PPKL untuk bekerja lebih baik dan lebih giat serta bekerja secara tepat, meningkatnya pemahaman PPKL mengenai perkoperasian serta meningkatnya pemahaman PPKL mengenai pelaksanaan tugas penyuluh koperasi;
- 2) Capacity building bagi PPKL sangat dibutuhkan, sebagai solusi dari permasalahan pengetahuan dan pemahaman PPKL, bukan hanya yang terkait dengan pengetahuan berkoperasi, namun juga metode dan teknik pelaksanaan penyuluhan bagi koperasi.

### b. Rekomendasi

- 1) Perlu peningkatan efektivitas pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas PPKL, baik yang terkait dengan penyempurnaan data base koperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, keragaan koperasi dikaitkan dengan berbagai indikator koperasi juara, serta berbagai hal lain yang dapat digunakan sebagai capaian kinerja dan kehadiran PPKL;
- 2) Kegiatan capacity building perlu dilakukan secara berkesinambungan,

mengingat heterogenitas PPKL yang cukup tinggi, yang dikaitkan dengan heterogenitas permasalahan koperasi yang kompleks serta dinamika dan perkembangan lingkungan mikro dan makro koperasi yang demikian pesat.

- 3) Kegiatan Capacity Building perlu ditindak lanjuti dengan bimbingan teknis berbagai hal yang terkait dengan teknik operasional dan manajerial koperasi, terlebih dikaitkan dengan digitalisasi koperasi dan perubahan teknologi informasi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard Scott and Homan Madeleine, *Coaching Secrets of The Top Executives*, Alih Bahasa Ayu Soetopo Schiner, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Dulfer Eberhard, *The Cooperative between Member Participation, The Formation of Vertical Organization and Bureaucratic Tendencies*, Quiller Press Ltd, London, 1985, copy right Phillips - University Marburg Germany.
- Muchtar Irsyad, *100 Koperasi Besar Indonesia*, Penerbit Majalah Peluang dan Infopasar, Jakarta, 2012.
- Ritzer George, Goodman J Douglas, *Teori Sosiologi Moderen*, Penerbit Kencana Jakarta, 2014.

## MEDIA

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190927/12/1153197/kemenkop-dan-ukm-rekrut-200-petugas-penyuluh-koperasi-lapangan>

<http://www.koran-jakarta.com/peran-petugas-penyuluh-koperasi-diperkuat/>

